

Gerakan Sosial di Tingkat Lokal dalam Upaya Menghadapi Dampak Transformasi Global¹

Victor Silaen²

Aturan-aturan baru globalisasi, berikut para "pemain" yang menulis berbagai aturan tersebut, terpusat pada upaya mengintegrasikan pasar-pasar global. Mereka mengabaikan begitu saja berbagai kebutuhan rakyat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar-pasar global. Proses integrasi tersebut memusatkan kekuasaan dan memarginalisasi golongan kaum miskin, entah itu negara maupun rakyatnya... Perdebatan mengenai globalisasi yang berlangsung saat ini... terlalu sempit; hanya terbatas pada persoalan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan. Karenanya, ia mengabaikan sejumlah persoalan kemanusiaan yang lebih luas, seperti kemiskinan global yang tetap langgeng, perkembangan ketimpangan yang semakin mencolok di antara maupun di dalam negara-negara, penyingkiran rakyat dan negara-negara miskin, serta tetap berlangsungnya pelanggaran hak-hak asasi manusia. (PBB, *The United Nations Human Development Report*, 1999)

Pengantar

Dunia dewasa ini menghadapi krisis tiga rangkap: makin dalamnya kemiskinan, makin luasnya perusakan lingkungan, dan makin besarnya ancaman disintegrasi sosial. Akar kesulitan global tersebut terletak pada tidak adanya hubungan yang jelas antara ekonomi global dan perspektif peradaban global. Ada sebuah kata kunci dalam konteks ini: global. Sebagai proses yang tengah berlangsung dewasa ini, globalisasi, ia mengindikasikan adanya pola utama dalam perubahan sosial yang tengah terjadi di mana-mana. Proses ini sedang mentransformasikan dunia menuju satu "tempat tinggal bersama". Tahapan-tahapannya meliputi perdagangan dan keuangan, aktivitas perusahaan, penentuan standar (skala umum ukuran umum, seperti halnya hak-hak asasi manusia secara universal), kebudayaan (termasuk konsumerisme global), ekologi (misalnya efek terhadap iklim global dan lapisan ozon), serta tumbuhnya kesadaran mengenai dunia sebagai sebuah "tempat tinggal bersama".

Hal-hal yang berkembang dan meluas dalam globalisasi itu terjadi karena revolusi industri kedua. Dalam revolusi industri pertama, kekuatan otot manusia telah digantikan oleh mesin-mesin. Akibatnya, produktivitas kerja meningkat dan struktur tarif pun berubah, sehingga terjadilah banyak pengangguran. Tapi, dalam konteks itu, manusia masih diperlukan. Sementara, dalam revolusi industri kedua, berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi seolah mampu memberi

¹ Makalah pengantar dalam Seminar "Menyikapi Dampak Transformasi Sosial Budaya di Era Global". Pusat Kajian Wilayah Amerika UI, Jakarta, 12 April 2005.

² Dosen Fisipol UKI dan Peneliti LP-UKI.

mata (untuk melihat), telinga (untuk mendengar), dan otak (untuk berpikir dan menginterpretasikan tindakan) bagi mesin-mesin tersebut. Dalam konteks ini manusia hampir-hampir tak diperlukan lagi.

Bagi kaum kapitalis, tentu saja perkembangan sedemikian merupakan hal yang sangat menguntungkan. Karena, dapat diprediksi bahwa kapital akan semakin bertambah dan kekuatan pun menyusul dengan sendirinya. Tetapi, bagi kelompok-kelompok lain yang tak mampu mengikuti perkembangan tersebut, dampak yang dialami justru merugikan: kemiskinan yang mendalam dan ketersisihan sosial. Hal ini, seiring waktu, akan diikuti pula oleh proses disintegrasi sosial. Belum lagi jika dicermati eksese-eksese susulan yang diakibatkan oleh pencapaian keuntungan sebesar-besarnya oleh kaum kapitalis itu. Misalnya saja kekerasan kolektif oleh negara, melalui perampasan hak-hak sosio-ekonomi rakyat. Begitupun peningkatan pengangguran dan perusakan lingkungan.

Permasalahan-permasalahan global tersebut utamanya terjadi dalam bidang ekonomi. Upaya mengatasinya, tanpa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, jelas tak mudah. Dunia masih terus bergelut di dalam hal itu. Sementara itu, di sisi lain, muncul lagi permasalahan lain dewasa ini yang menyusul berakhirnya perang ideologi dalam Perang Dingin. Yakni, perbedaan dan pertentangan peradaban. Memang, dunia secara keseluruhan makin menerima kebiasaan-kebiasaan hidup baru peradaban global. Namun, sementara itu, tradisi-tradisi kuno pun hidup kembali dan mendesak untuk mencari "ruang baru" demi keberadaannya yang baru. Bahayanya, bukan karena ia bersifat budaya, melainkan dilandasi oleh spirit agama dan mengambil bentuk perjuangan politik.

Globalisasi dan Dampaknya

Sejak dekade 1990, dapat dikatakan, kita telah memulai hidup di era globalisasi, terutama jika dilihat dari berkembang pesatnya teknologi telekomunikasi. Perkembangan sedemikian telah menyebabkan terjadinya arus deras informasi dan gagasan dari berbagai penjuru dunia serta memudahkan terjadinya komunikasi antarorang di seluruh dunia. Kita, karenanya, bagaikan hidup di sebuah desa global (*global village*) karena jarak fisik yang relatif tak lagi menjadi hambatan berarti untuk berinteraksi. Perkembangan tersebut telah menyebabkan terjadinya pula perubahan dalam realita dan situasi kehidupan yang kian "asing" dan kompleks, yang membuat sebagian orang, jika tak mampu beradaptasi dengannya, bisa saja mengalami "keterkejutan budaya" sehingga merasa teralienasi dengan segala yang serbabaru itu. Maka, di satu sisi, globalisasi dapat menyebabkan terjadinya ketertinggalan dan kenestapaaan bagi sebagian orang. Namun, di sisi lain, ia juga memberikan peluang bagi eskalasi evolusi peradaban ke arah yang lebih baik karena harus mengikuti tren global. Yang dimaksud dengan itu adalah: 1) bergulirnya demokrasi dan demokratisasi; 2) dihormatinya hak-hak asasi manusia (HAM).

Dapat dikatakan, kedua hal tersebut baik adanya. Sehingga, tak heran, jika sejak dekade 1990 pula di Indonesia sudah banyak kalangan yang berjuang mengusung kedua isu tersebut. Terkait dengan yang pertama, sejarah telah membuktikan bahwa hingga kini demokrasi masih merupakan konsep terbaik untuk dioperasionalisasikan dalam pelbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karena, pada dasarnya, demokrasi ingin mengembalikan kedaulatan

rakyat dan menciptakan keterbukaan yang seluas-luasnya bagi sebesar-besarnya gerak mempertinggi derajat kemanusiaan. Di dalamnya terkandung pengakuan dan penghargaan akan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, individualitas, dan independensi. Sedangkan yang kedua, HAM, sebenarnya berkait erat dengan demokrasi. Sebab, tanpa penghargaan akan HAM, demokrasi niscaya tak bermakna. Tanpa penghargaan akan HAM setiap orang, rakyat di suatu negara tak mungkin berdaulat. Dan jika rakyat tak berdaulat, mungkinkah negara yang bersangkutan dianggap telah demokratis?

Namun, globalisasi tak sebatas itu saja. Ia, yang utama, justru merupakan suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global, yang ditandai dengan penciptaan kebijakan perdagangan bebas (*free trade*), meluasnya peran pasar (*free market*), serta meningkatnya investasi, dan dengan aktor-aktor bukan hanya negara tetapi juga perusahaan transnasional (TNCs), bank-bank transnasional (TNBs), serta lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF).

Selama beberapa tahun terakhir ini kita telah disesaki oleh pernyataan-pernyataan yang digembar-gemborkan oleh para penganjur globalisasi ekonomi maupun pemimpin lembaga-lembaga Bretton Woods (1948) - dalam hal ini Bank Dunia, IMF, World Trade Organization (WTO), dan lainnya - bahwa tujuan utama mereka mendesak globalisasi ekonomi adalah untuk membantu kaum miskin di dunia. Mereka berpendirian bahwa dengan menghilangkan berbagai hambatan terhadap perdagangan perusahaan besar dan berbagai investasi keuangan, itulah gagasan terbaik menuju pertumbuhan dan jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Menurut mereka, berjuta-juta orang yang secara terang-terangan menentang model globalisasi ekonomi justru akan merugikan kepentingan kaum miskin. Karena itu, setiap orang dipersilakan minggir dan menyerahkan seluruh persoalan itu kepada perusahaan-perusahaan besar, bankir-bankir, dan birokrasi-birokrasi global untuk melakukan perencanaan dan pemecahan atas berbagai persoalan global. Dan, sejumlah media pun mendukungnya, dengan menulis, misalnya, bahwa "para pemrotes tengah memblokir satu-satunya jalan bagi orang-orang miskin di dunia untuk keluar dari kemiskinan." Dengan kata lain, jika protes-protes tersebut berhenti, maka IMF, Bank Dunia, WTO, perusahaan Nike, Monsanto, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya akan membawa berkah keselamatan bagi kaum miskin.³

Tapi, betulkah globalisasi membawa berkah di dalam kehidupan kita? Ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal. Meskipun globalisasi kerap dikampanyekan sebagai era masa depan, suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan niscaya mendatangkan kemakmuran global, namun dapat dikatakan globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme dan pembangunanisme (*developmentalisme*) sebelumnya. Itulah sebabnya, globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi dunia, sejak awal telah dicurigai sebagai bungkus baru kolonialisme dan imperialisme oleh

³*Globalisasi Kemiskinan dan Ketiimpangan*, International Forum on Globalization, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003, hal. 3-4.

para ilmuwan sosial kritis yang memikirkan perlunya tata ekonomi dunia yang adil.

Sejauh ini, hampir seluruh fakta dalam beberapa dekade terakhir (1970-2000) - masa pengaruh tercepat dari globalisasi ekonomi - menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi justru telah menciptakan kondisi sebaliknya dari apa yang digembar-gemborkan para penganjurnya. Kemiskinan dan ketimpangan justru telah melaju dengan cepat dan sesaat kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai ideologi dan aturan main globalisasi ekonomi — termasuk perdagangan bebas, privatisasi, dan penyesuaian struktural — telah menghancurkan kehidupan berjuta-juta orang. Bahkan, bagi orang-orang yang sebelumnya telah hidup di dalam kemiskinan, globalisasi ekonomi telah membuat kehidupan mereka dalam segala sesuatunya menjadi lebih buruk; bukan lebih baik.⁴

Resistensi terhadap Globalisasi

Maka, seiring waktu, pesatnya kemajuan globalisasi telah menimbulkan banyak korban, baik masyarakat adat, kaum miskin kota, dan golongan marjinal lainnya. Padahal, sementara itu, hampir semua pemerintah telah menerima globalisasi dan mulai melakukan penyesuaian kebijakan. Undang-undang dalam negeri, misalnya, banyak yang disesuaikan dengan kebijakan yang disepakati dalam aturan global menyangkut soal investasi, hambatan perdagangan, pertanian dan pertanahan, pajak, hak paten, dan lain sebagainya. Pemerintah seakan menutup mata atas kenyataan bahwa sebagian rakyatnya belum tentu sepenuhnya menerima globalisasi. Akibatnya, seiring waktu pula, telah mulai muncul gerakan-gerakan resistensi terhadap globalisasi, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Area-area resistensi terhadap globalisasi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.⁵

Pertama, resistensi gerakan budaya dan agama terhadap globalisasi. Sudah lama terdapat fenomena lahirnya gerakan yang berbasis agama maupun budaya melawan pembangunan dan globalisasi. Gerakan ini timbul di mana-mana dan dengan label bermacam-macam pula. Di Mesir, misalnya, kekecewaan terhadap pembangunan yang melanda kalangan warga muslim miskin perkotaan telah melahirkan gerakan berbasis keagamaan yang dilabeli dengan Fundamentalisme Islam. Gerakan resistensi keagamaan terhadap pembangunan dan globalisasi di tempat lain ternyata juga melahirkan suatu gerakan teologi yang bercorak pembebasan dalam Islam, seperti yang terjadi di Indonesia. Akan halnya di India, resistensi terhadap pembangunan dan globalisasi telah membangkitkan kelompok Hindu Revivalis (*Rashtriya Swayamsewak Sangh*) yang mendesak Pemerintah India untuk memboikot barang-barang buatan asing.

Kedua, resistensi dari gerakan yang dikategorikan sebagai *new social movement* dan *global civil society* terhadap globalisasi. *New social movement* pada intinya merupakan sebetuk gerakan protes masyarakat yang beranggotakan kelompok-kelompok lokal tertentu yang saling berjejaring dan tidak terkait dengan

⁴ *Ibid.*, hal. 5. Bandingkan dengan pembahasan Walden Bello bersama Shea Cunningham dan Bill Rau dalam *Dark Victory, The United States, Structural Adjustment and Global Poverty*, Institute for Food and Development Policy, 1994

⁵ Lihat Mansur Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001, hal 222-226.4

gerakan massa dari suatu partai politik atau suatu perserikatan, serta yang memiliki prinsip dan cara tersendiri dalam melakukan aksi-aksi protesnya. Gerakan ini berbeda dengan gerakan buruh yang berorientasi semata-mata pada keadilan ekonomi dan mengandalkan massa sebagai kekuatannya. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip penjelasan Young⁶:

These movements are called "new" for at least two reasons. First, on the whole their issues do not primarily concern inclusion in basic citizenship rights nor the enlargement of economic rights. Their issues are more specifically social-respect and self-determination for cultural difference, responsibility and pluralism in everyday lifestyle, reflection on power in social interaction, participation in social and economic, as well as political, institutions. Secondly, the form of organization of this movements does not replicate the mass movement form of political party or union, a unified bureaucracy seeking power through resource mobilization. Instead, these new social movements tend to be networks of more local groups, each with their own principles and style, that nevertheless act in concert en masse in some protest actions.

Akan halnya Auda, seperti dikutip Haynes, mengatakan bahwa gerakan sosial baru ini selalu menentang *status quo* - mereka anti-sistem, menyerukan dan memadukan tuntutan akan perubahan tatanan sosial, politik dan atau ekonomi. Dengan demikian, gerakan sosial baru ini berupaya untuk mencapai perubahan tingkat tinggi, tertanam, dan berasal dari persepsi tentang apa yang benar dan apa yang salah di dalam masyarakat - bukan pada pemerintah atau penguasa. Sedangkan Escobar dan Alvarez, yang juga dikutip Haynes, mengatakan bahwa ciri utama gerakan sosial baru adalah bahwa mereka menandingi dasar politis negara: mereka tidak tumbuh dalam isolasi dari para pelaku sosial dan politik lain tetapi merupakan pelaku kolektif terorganisir yang terlibat dalam perjuangan politik atau budaya yang berkelanjutan melalui jalan lain ke arah bentuk aksi yang institusional dan ekstra-institusional.⁷

Tema tantangan terhadap *status quo* itu juga ditekankan oleh Cohen, seperti dikutip Haynes. Menurutnya, gerakan sosial baru berupaya untuk membangun identitas sosial baru, menciptakan ruang demokrasi bagi aksi sosial yang otonom dan menafsirkan kembali norma dan membentuk ulang lembaga-lembaga. Gerakan sosial baru hendaknya dipandang sebagai reaksi terhadap manifestasi modernisasi budaya, teknologi, dan institusional yang berupaya untuk mendominasi pandangan sosial politik baru di sebagian besar dunia. Ringkasnya, gerakan sosial baru berupaya untuk menggerakkan bagian-bagian dan kelompok-kelompok yang tertindas atau yang tereksplorasi dalam cara yang "baru" atau berbeda, khususnya melalui "proses-proses kapitalisme modern".⁸

⁶ Iris Marion Young, "Political Theory: An Overview", dalam *A New Handbook of Political Science*, Robert E. Goodin dan Hans Dieter Klingemann, New York: Oxford University Press Inc., 1996, hal. 492.

⁷ Lihat Jeff Haynes dalam *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, terj. P. Soemilro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000, hal 24-28.

Menambahi keterangan tentang gerakan sosial baru, teolog sosial Martin Lukito Sinaga, yang mengacu pada Cohen dan Arato (1996), mengatakan bahwa gerakan yang sering dijuluki sebagai *self-limiting radicalism* ini tampak secara global, misalnya, melalui *Green Peace*, Feminisme, *Truth and Reconciliation* atau gerakan anti-kekerasan semasa rezim apartheid di Afrika Selatan, *Indigenous People Movement*, gerakan akar rumput gereja-gereja di Filipina, atau *Civil Disobedience* oleh Martin Luther King Jr. di AS. Tampak adanya resistensi dan alternatif di situ, namun mengubur cara-cara, bahkan upaya-upaya, memimpin revolusi. Selanjutnya, gerakan ini bergerak mulai dari media massa, lembaga pembela HAM, komisi independen pemantau pemilihan umum, yang secara laten mempengaruhi masyarakat – karena pengaruh opini dan jaringan dialognya – sampai secara konkret mengaksentuasi diri melalui demonstrasi damai, mogok makan, dan boikot.⁹

Kemunculan gerakan sosial baru dapat dilihat sebagai unsur utama dalam proses memperkuat *civil society* di masa mendatang.¹⁰ Konsep ini didefinisikan sebagai masyarakat yang sadar akan hak-haknya sebagai warganegara, dan yang berdaya menentukan masa depannya sendiri, serta yang berani berjuang melawan praktik-praktik penindasan dan ketidakadilan yang datang dari negara.¹¹ Mengacu pada Alexis de Tocqueville¹², *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, keterkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warga masyarakat. Sedangkan Alfred Stepan¹³ mendefinisikannya sebagai arena tempat berbagai gerakan sosial (seperti himpunan ketetanggaaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompok intelektual) serta organisasi sipil dari semua kelas (seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh, dan usahawan) berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengekspresikan diri sendiri dan memajukan pelbagai kepentingan mereka.

Akan halnya Ernest Gellner mengatakan bahwa *civil society* adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Dalam arti, institusi-institusi tersebut memiliki kemampuan untuk dapat menghalangi atau membendung negara dalam mendominasi kehidupan masyarakat.¹⁴ Namun, tidak berarti *civil society* dimaksudkan untuk mengingkari kegiatan negara dalam menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dan peran negara sebagai wasit di antara berbagai konflik yang muncul dan dapat menghancurkan tatanan sosial dan politik secara

⁹ *Ibid*, hal 25.

¹⁰ Martin Lukito Sinaga, "Gereja dan Masyarakat di Indonesia", artikel dalam Weinata Sairin (ed.), *Visi Gereja Memasuki Milenium Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hal. 43-44.

¹¹ Lihat Rochman Achwan, "Gerakan Sosial Baru dan Formasi Sosial Masyarakat Madani", artikel dalam Arief Subhan (ed.), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LSAF, 1999, hal 247-250.

¹² Definisi ini hanya merupakan sintesis saya terhadap pendapat Emil Salim dalam wawancaranya dengan *Kompas*, 18 April 1995, artikel Bonnie Setiawan, "Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil" dalam *Prisma* No. 71 1996, dan artikel Otto Syamsuddin Ishak, "Gerakan Protes Petani: Sebuah Skeisa Teoritis Strukturalis Scottian dan Kulturalis Weberian" dalam *Prisma* edisi yang sama.

¹³ Lihat Alexis de Tocqueville dalam *Democracy In America*, New York: Harper and Row, 1969. Bandingkan dengan Larry Diamond, "Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation" dalam *Jurnal of Democracy*, edisi Juli 1994, hal. 5; dan Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1997.

¹⁴ Lihat Alfred Stepan dalam *Militer dan Demokratisasi, Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain*, Jakarta: Grafiti Press, 1996.

¹⁵ Ernest Gellner, *Condition of Liberty, Civil Society and Its Rival*, terj. Ilyas Hasan, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995, hal.6.

keseluruhan. Selain itu, *civil society* juga mengakui kebebasan individual dalam suatu institusi - dalam arti, institusi tersebut dapat dimasuki atau ditinggalkan individu tersebut dengan bebas. Sekaitan dengan itu, Daniel Bell¹⁵ menambahkan bahwa *civil society* niscaya memiliki fungsi kontrol terhadap negara, dalam arti mampu mengimplementasikan prinsip *checks and balances* (pengawasan dan penyeimbangan).

Banyak pemikir yang mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh melalui penguatan *civil society*, dan eksistensi *civil society* itu sendiri ditandai oleh kemunculan ornop-ornop (organisasi non-pemerintah) di masyarakat.¹⁶ Memang, kaitan antara demokrasi dan *civil society*, dan bahkan antara *civil society* dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, telah dilihat sebagai fakta empiris oleh de Tocqueville sebagaimana disebut di atas. Pengamat asal Perancis ini melihat bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tumbuh subur di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 merupakan "sokoguru" demokrasi, sementara *civil society* merupakan unsur kesehatan budaya dalam masyarakat. Organisasi-organisasi itulah sebenarnya yang memberikan wujud konkret masyarakat. Dan masyarakat itu sendiri bisa mempunyai posisi kuat dan independen dalam berhadapan dengan negara, karena organisasi-organisasi itu adalah lembaga-lembaga yang mandiri, dalam arti mampu menghidupi diri sendiri dan tidak bergantung kepada negara.

Dalam wacana mutakhir, sejumlah ahli, antara lain Callahan, berdasarkan pengamatannya atas Korea Selatan, kurang setuju dengan istilah *civil society*. Mereka lebih setuju dengan istilah *new social movement*, yang pilarnya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagaimana yang telah dikenal luas di Indonesia.¹⁷ Kalau ada yang "baru" (*new*), berarti ada pula yang "lama" (*old*). Jika gerakan yang "lama" itu meniscayakan jumlah anggota yang banyak, maka gerakan yang "baru" ini tidak mengandalkan massa sebagai kekuatannya. Gerakan sosial baru, dengan ornop-ornop yang menjadi pilarnya, memiliki misi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah atau ekkses-ekkses yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan modernisasi, yang berkenaan dengan isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, pemberantasan kemiskinan, konsumerisme, ketidakadilan gender, dan lainnya. Jadi, ornop memang harus bersikap kritis terhadap masalah-masalah pembangunan dan modernisasi, juga terhadap peran negara dan pemerintah. Karena itu, ornop dapat dianggap sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*) terhadap pemerintah dan sektor swasta.

Secara ringkas, perbedaan antara gerakan sosial "lama" dan "baru" dapat dijelaskan berikut ini.¹⁸ Pertama, jika gerakan sosial lama memfokuskan pada

¹⁵ Lihat artikel Daniel Bell, "American Exceptionalism Revisited, The Role of Civil Society", dalam Jurnal *The Public Interest* No. 9.

¹⁶ Dikutip oleh M. Dawam Rahardjo dalam pengantarinya untuk buku *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society. Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF, 1999, hal. xxi-xxii.

¹⁷ Di Indonesia, istilah LSM belakangan ini diupayakan untuk diganti dengan "ornop", kependekan dari "organisasi non-pemerintah" atau NGO (*non-government organization*). Dalam studi ini, saya memilih untuk menggunakan istilah ornop daripada LSM. Alasannya, karena di dalam istilah tersebut jelas terkandung adanya "penolakan" atas keterlibatan pemerintah di dalamnya. Jadi, idealnya, ornop memang harus independen dan tidak terkooptasi oleh negara. Bandingkan dengan Bonnie Setiawan, "Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil", dalam *Prisma* No. 7/1996, hal. 35-45.

keresahan ekonomi, maka gerakan sosial baru memfokuskan pada kaitan antara isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas (misalnya, bahaya pencemaran, lingkungan bagi pengembangan identitas individu). Kedua, gerakan sosial lama sering menyandarkan pada ideologi politik tertentu, sedangkan gerakan sosial baru menerima pluralisme ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis dalam upaya menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan. Impian-impian revolusioner yang menjadi ciri sebagian besar gerakan sosial lama telah dibenamkan oleh gerakan sosial baru. Penekanan pada isu-isu simbolik, identitas, dan bebas dari pengaruh ideologi politik tertentu mengandung arti bahwa gerakan sosial baru lebih menaruh perhatian pada *life politics* dibanding *emancipatory politics*. Itulah sebabnya, keanggotaan dalam gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa hiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama. Dengan demikian maka gerakan sosial baru dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan inklusif, yang sesuai dengan prasyarat utama sebagai komponen *civil society*. Lebih lanjut, gerakan sosial baru sering diprakarsai oleh individu-individu dan kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang secara sadar memobilisasi diri untuk bersama-sama memperjuangkan *democratization of everyday life*.

Ketiga, yang sebenarnya dapat dimasukkan juga dalam kategori gerakan sosial baru seperti dijelaskan di atas, adalah resistensi gerakan lingkungan terhadap globalisasi. Meski tak semua gerakan lingkungan secara langsung menentang globalisasi, berkembangnya gerakan lingkungan untuk pemberdayaan rakyat (*eco-populism*) dan gerakan lingkungan yang dipengaruhi kesadaran lingkungan sebenarnya juga bersumber dari Barat. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh pikiran Rachel Carson dalam "*Silent Spring*" yang membongkar tentang kerusakan ekosistem dunia yang diakibatkan oleh praktik ekonomi modern seperti penggunaan kimia dalam pertanian dan langkanya burung dan khususnya menentang asumsi dan praktik pertumbuhan ekonomi yang ingin menyeimbangkan perlindungan alam untuk suatu gaya hidup. Kesadaran lingkungan seperti itu sebagian memicu lahirnya gerakan "lingkungan demi lingkungan" yang juga berakibat lahirnya gerakan fasisme ekologi (*eco-facism*)¹⁹.

Sementara itu, eko-populisme lahir sebagai keprihatinan terhadap rusaknya lingkungan karena juga menghancurkan kehidupan rakyat sekitarnya. Itulah sebabnya, gerakan lingkungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam pada itu, muncullah gerakan resistensi lingkungan di Dunia Ketiga, seperti gerakan masyarakat Chipko (*Hipko Movement*) di India, yakni suatu gerakan, terutama oleh kaum perempuan, yang menentang perusahaan penebangan hutan. Sedangkan di Indonesia ada Walhi, suatu organisasi jaringan gerakan lingkungan yang dalam perjalanan organisasinya juga menjelma menjadi gerakan resistensi terhadap globalisasi. Gerakan ini juga berjejaring dengan gerakan-gerakan sejenis di tingkat lokal, di samping juga memiliki cabang-cabang di daerah-daerah tertentu.

¹⁹ Lihat Achwan, *op.cit.*, hal 247-248.

²⁰ Fakhri, *op.cit.*

Gerakan Sosial di Indonesia

Penandatanganan kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) di Marakesh, Maroko, tahun 1994, dan ditandatanganinya kesepakatan lainnya seperti NAFTA (*North America Free Trade Area*), APEC (*Asia Pasific Economic Conference*), yang dilanjutkan dengan didirikannya WTO tahun 1995, serta dilaksanakannya *Structural Adjustment Program* oleh Bank Dunia, merupakan pertanda bahwa globalisasi tengah berlangsung. Indonesia dan negara-negara ASEAN pun segera menyambutnya. Hal itu terlihat dengan bertumbuhnya kawasan-kawasan segitiga pertumbuhan regional antarnegara (seperti Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines *East Growth Triangle* — Bimpeaga), maupun kawasan pertumbuhan terpadu suatu kawasan industri yang bebas dari campur tangan pemerintah (seperti Otorita Batam atau Singapura, Hohor dan Riau/Sijori) maupun kawasan pertumbuhan terpadu di berbagai wilayah lainnya.

Dapat dikatakan, Indonesia sendiri telah menjadi bulan-bulanan kapitalis global sejak 1980-an, namun sangat mengherankan bahwa gelombang reaksi terhadap fenomena tersebut begitu minimnya; mungkin hanya beberapa orop seperti INFID (*International Forum for Indonesia Development*) dan IGJ (*Institute for Global Justice*) yang menyikapinya secara kritis.²⁰ Padahal, di negara-negara tetangga, resistensi globalisasi telah bermunculan seperti gerakan hijau, feminisme, gerakan masyarakat akar rumput. Misalnya dalam bentuk gerakan resistensi terhadap pembangunan dam (Narmada Dam) di India tahun 1980-an. Pada 1972, gerakan untuk menyelamatkan Narmada ini berhasil mendesak Bank Dunia untuk mencabut dukungannya terhadap proyek tersebut. Gerakan yang mewarisi "sikap kritis Mahatma Gandhi" ini merupakan gerakan sosial baru yang menantang meningkatnya sentralisasi dan watak otoritarian kekuasaan negara dan sikap ekstraktif dari proses ekonomi yang dominan.

Di Indonesia sendiri, meski dapat dikatakan "agak terlambat", kelak muncullah gerakan sosial baru dalam skala lokal, nasional, dan bahkan semakin mengglobal. Sebutlah, misalnya, Gerakan "Koalisi anti Hutang" Indonesia pada awal abad ke-21 ini, serta berbagai koalisi orop menentang WTO. Masih banyak kasus tentang gerakan masyarakat di tingkat akar rumput yang melakukan resistensi terhadap globalisasi dengan melakukan aksi-aksi lokal. Gerakan Pembaharuan Agraria yang dikembangkan oleh Serikat Petani Sumatera Utara dan Konsorsium Pembaharuan Agraria, serta gerakan petani ramah lingkungan dan petani *Interated Pest Management* untuk memperjuangkan hak-hak petani serta gerakan anti Revolusi Hijau para petani di Jawa, pada dasarnya merupakan respons masyarakat lokal dalam menghadapi dampak globalisasi.

Gerakan sosial baru seperti itu, sejak dekade terakhir ini, kian banyak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya dalam bentuk gerakan masyarakat adat untuk menuntut dikembalikannya kedaulatan atas tanah-tanah ulayat (termasuk sumberdaya-sumberdaya alamnya) melalui perjuangan gerakan masyarakat adat. Sebutlah, misalnya, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

²⁰ Lihat pengantar I. Wibowo dalam buku *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, International Forum on Globalization, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003

yang berjejaring dengan AMA (Aliansi Masyarakat Adat) di daerah-daerah. Contoh lain adalah Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro), beserta yayasan-yayasan (atau disebut juga "LSM suku") yang terkait dengan kedua lembaga ini, yang berjuang melawan proyek pertambangan PT Freeport Indonesia, di Kabupaten Mimika, Papua.²¹

Upaya menghidupkan kembali modal sosial (*social capital*), yang dulu pernah sangat bermakna di dalam kehidupan bersama, juga merupakan sesuatu yang hendak dicapai melalui gerakan sosial baru ini. Misalnya, gerakan menghidupkan kembali "nagari" di Minangkabau²², "bius" di Tapanuli Utara, dan gerakan-gerakan lain yang sejenisnya. Di sisi lain, gerakan-gerakan ini juga sekaligus dapat berfungsi sebagai "sekolah demokrasi" (*democracy in daily life*) — wadah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bersama. Misalnya, yang beranggotakan warga dan mahasiswa, seperti *Volunteer Development Corps* di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Selain itu, tentu saja, bisa juga untuk basis perlawanan terorganisir terhadap penguasa (baik negara maupun kaum kapitalis).²³

Gerakan sosial baru, dalam konteks tertentu, bisa diperkuat oleh ikatan-ikatan primordial; sehingga karena itulah maka sentimen-sentimen kesukuan dan keagamaan tak perlu dipandang sebagai hal-hal yang negatif dan harus dijauhi. Di Toba Samosir, misalnya, dalam kasus menentang kehadiran Indorayon (sebuah industri besar penghasil pulp dan rayon), warga setempat kemudian mendirikan omop SRB (Suara Rakyat Bersama) sebagai wadah perjuangannya. Lama-kelamaan, omop ini semakin membesar dengan berdirinya komisariat-komisariat di berbagai desa. Di samping itu, kiprahnya pun semakin meluas karena berjejaring dengan omop-ornop lain di kota-kota besar (misalnya di Medan dan Jakarta) dan bermitra dengan omop-ornop berskala nasional (seperti Walhi dan YLBHI).

Gerakan-gerakan sosial baru dalam kasus menentang Indorayon ini turut pula diperkuat oleh energi kebatakan (yang merupakan suku dari mayoritas anggotanya) yang menyatukan dan menghimpun mereka di dalam perjuangan keras dan berkepanjangan. Energi lainnya, kalau boleh disebut begitu, didapat pula dari gereja-gereja yang kelak berjejaring mendukung gerakan rakyat setempat tersebut. Alhasil, Indorayon boleh dibilang "kalah" dari perspektif tertentu: 1) karena harus berganti nama (menjadi Toba Pulp Lestari) dan mengurangi jenis produksinya (tinggal pulp saja); 2) karena harus menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan peduli masyarakat sekitar, antara lain dengan menyumbang kira-kira 3% dari biaya produksinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping juga menerima putra-putra daerah menjadi karyawan dan mitra (kontraktor) perusahaan.

²¹ Lihat uraian lengkap tentang gerakan perlawanan Orang Amungme dan Orang Kamoro terhadap PT Freeport Indonesia dalam Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja, 2003. Bandingkan dengan pembahasan tentang gerakan perlawanan Suku Amungme di Papua Barat terhadap PT Freeport Indonesia, dalam AE Priyono (ed.), *Aktor Demokrasi (Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia)*, Jakarta: ISAI, 2001.

²² Lihat uraian Zukri Saad Si. Majo Basa tentang hal ini dalam "Revitalisasi Nagari: Langkah Antisipatif Sumatera Barat Menuju Kemandirian Daerah", dalam N. Kusuma dan Fitria Agustina (eds.), *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Insits Press, 2003, hal 26-39.

²³ Lihat uraian A. Budi Susila dan Gito Haryanto dalam "Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan: Studi Kasus di Wonosari-Gunungkidul-Yogyakarta", dalam N. Kusuma dan Fitria Agustina (eds.), *ibid*, hal. 40-70.

Memang, hingga kini Indorayon masih terus beroperasi, tapi ia kini tak lagi bisa bersikap arogan dan represif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sekitar.

Kasus masyarakat setempat versus industri besar yang hadir di sekitar masyarakat tersebut, sebagaimana terjadi di Toba Samosir, berbeda dengan apa yang terjadi pada kasus masyarakat di Buyat, Sulawesi Utara, versus PT Newmont. Di sana, hingga kini, tak terdengar munculnya gerakan-gerakan sosial yang solid dalam menentang kehadiran maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan Newmont. Sebaliknya, justru pemerintahlah akhirnya yang mengajukan gugatan terhadap perusahaan ini. Di mana gerangan orang-orang Minahasa itu?

Penutup

Dalam rangka menyikapi transformasi global dan menghadapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, setiap orang kiranya perlu membentuk dan/atau melibatkan diri dengan omop-omop yang bertujuan karitatif (memberikan bantuan-bantuan) atau transformatif (berjuang untuk mengubah sistem dan struktur yang menjadi sumber ketidakadilan). Di antara kategori karitatif dan transformatif ini sebenarnya masih bisa dimasukkan jenis-jenis omop yang bertujuan konsultatif atau advokatif (memberikan saran, nasihat, sekaligus pendampingan). Untuk mendukung efektivitas gerakan, diperlukan pula media-media (setidaknya jenis cetak) atau berjejaring dengan media-media (baik cetak maupun elektronik).

Sekaitan itu, perlu disimak pikiran David C. Korten tentang peran omop "generasi keempat" yang menjadi fasilitator gerakan rakyat (*peoples's movement*).²⁴ Rumusan Korten mengenai tujuan gerakan rakyat adalah "menggerakkan sebuah massa kritis yang penuh dengan inisiatif mandiri dan tidak tersentralisir agar mendukung suatu visi sosial".

Menurut dia, tugas organisasi sukarela generasi keempat ini adalah menggabungkan dan menggerakkan jaringan swakelola yang sama sekali tidak di bawah kekuasaannya. Ini harus dicapai, terutama melalui kekuatan gagasan, nilai-nilai, dan hubungan komunikasi.²⁵ Sementara menurut Bonnie Setiawan, rumusan Korten mengenai gerakan rakyat ini sebenarnya cukup baik, terutama bila dikaitkan dengan gerakan *civil society*. Penekanan pada "tindakan sukarela" di dalam gerakan omop merupakan prinsip penting yang sebaiknya bisa secara tajam dirumuskan sebagai "komitmen sosial politik". Dalam perkembangannya, organisasi rakyat

²⁴ Adapun generasi pertama omop disebut "*relief and welfare*", yang memfokuskan pendampingannya pada masalah-masalah penanggulangan musibah/bencana dengan berupaya memenuhi kekurangan tertentu yang dialami korban. Jadi, sifatnya lebih karitatif. Sedangkan generasi kedua disebut "*community development*" atau "*self-reliants local development*", yang memfokuskan perhatiannya pada masyarakat kecil agar mampu memenuhi kebutuhannya, dengan cara mengembangkan masyarakat sekitarnya. Jadi, sifatnya lebih mengarah pada manajemen pengembangan sumber-sumber daya. Akan halnya generasi ketiga disebut "*sustainable systems development*", yang melihat akar masalah masyarakat lebih pada masalah politis, yakni struktur penguasa dengan jaringan kuat yang menjadi pembuat kebijakan pembangunan untuk kepentingan *status quo*. Jadi, fokusnya lebih pada manajemen strategis. Generasi keempat, seperti dijelaskan di atas, dicirikan dengan kepeduliannya yang besar untuk terjadinya transformasi masyarakat. Pada dasarnya, generasi ketiga dan keempat omop ini lahir akibat tekanan sistem politik yang didominasi oleh segelintir penguasa politik dan ekonomi, yang karenanya omop-omop ini berupaya untuk memperjuangkan demokratisasi serta penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Lihat Sebastian Saragih, *Membedah Perut LSM*, Jakarta: Puspa Swara, 1993, hal. 5-6. Bandingkan dengan Bonnie Setiawan, "Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil", dalam *Prisma* No. 7-1996, hal. 48.

dan gerakan rakyat mempunyai aspirasi sendiri yang lebih murni dan menolak tunduk pada kemauan partai politik. Gerakan rakyat juga mempunyai aspek murni sebagai demokrasi langsung "dari-oleh-untuk" rakyat tanpa memerlukan mediasi partai politik atau kelompok kepentingan. Realitas inilah yang mencerminkan bangkitnya gerakan rakyat baru di dunia. Mereka tidak terikat pada partai politik atau ideologi tertentu, tetapi terikat pada perjuangan sejati rakyat.²⁶



²⁵ Lihat pembahasan yang cukup mendalam tentang hal ini dalam artikel Bonnie Setiawan, *ibid.*, hal. 35-52.

²⁶ Lihat Setiawan, *ibid.*, yang mengutip John A. Moses dalam *Trade Union Theory From Marx to Walesa*; juga Chico Mendes, *Berjuang Menyelamatkan Hutan*, Jakarta: Walhi dan YOI, 1994.